

Security Perceptions in The Digital Democracy Era

Edy Purwo Saputro¹ , Dewi Probowati Setyaningrum²

¹Department of Management, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

²Department of Management, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

 eps135@ums.ac.id

Abstract

The era of digitalization is part of current developments and technology adoption is a factor that supports the development of digitalization. Therefore, changing the model for implementing a democratic party from an ancient, manual, traditional and offline system to a modern and online system is a rational choice to support perceived ease of use and perceived usefulness, although on the other hand there are risks, including the threat of human error and technical error. This research used qualitative analysis involving 6 participants representing the millennial generation regarding perceptions of security in holding online democratic parties or e-voting. The results confirmed that participants agreed that the adoption of e-voting supported perceived ease of use and perceived usefulness, even though it needed to reduce the risks involved. Therefore, it is necessary to prepare a credible e-voting system to increase trust and reduce all risks.

Keywords: *democracy, e-voting, online, millennial*

Persepsian Keamanan di Era Demokrasi Digital

Abstrak

Era digitalisasi menjadi bagian perkembangan jaman dan adopsi teknologi menjadi faktor yang mendukung perkembangan digitalisasi. Oleh karena itu, perubahan model pelaksanaan pesta demokrasi dari sistem kuno, manual, tradisional, dan offline menjadi sistem yang modern dan online menjadi pilihan rasional untuk mendukung persepsian kemudahan dan kemanfaatan, meski di sisi lain ada risiko, termasuk juga ancaman risiko human error dan technical error. Riset ini menggunakan analisis kualitatif melibatkan 6 partisipan yang mewakili generasi milenial terkait persepsian keamanan dalam pelaksanaan pesta demokrasi secara online atau e-voting. Hasilnya menegaskan bahwa partisipan setuju adopsi e-voting yang mendukung persepsian kemudahan dan kemanfaatan, meski perlu mereduksi risiko. Oleh karena itu, perlu disiapkan sistem e-voting yang kredibel untuk meningkatkan kepercayaan dan mereduksi semua risikonya.

Kata kunci: *demokrasi, e-voting, online, milenial*

1. Pendahuluan

Pesta demokrasi (pemilu) menjadi salah satu muara untuk mendukung regenerasi kepemimpinan sehingga sukses pelaksanaan pesta demokrasi menjadi acuan untuk menciptakan kepemimpinan baru secara baik dan benar [1] [2] [3]. Meski demikian, komitmen menciptakan pelaksanaan pesta demokrasi yang baik dan benar bukanlah persoalan yang mudah, terutama mengacu kepentingan suksesi sebagai bagian untuk melanjutkan kekuasaan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan hajatan pesta demokrasi menjadi penting dan karenanya hal ini membutuhkan dukungan dari semua pihak, tidak hanya di pusat tapi juga di daerah, tidak hanya secara sektoral tapi juga lintas sektoral. Fakta memberikan penegasan bahwa praktik curang pelaksanaan pesta demokrasi cenderung terjadi dengan berbagai modus, baik itu dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, termasuk juga yang dilakukan penguasa ataupun pihak di luar kekuasaan dalam pemerintahan [4] [5] [6] [7].

Pelaksanaan pesta demokrasi yang selama ini dilakukan secara periodik 5 tahunan memang telah berhasil melahirkan regenerasi kepemimpinan nasional, meski di sisi lain masih menyisakan adanya sejumlah persoalan, misalnya biaya yang terlalu besar, pelaksanaan yang kurang praktis karena ini terkait persoalan sebaran geografis dan demografis, dan fakta ancaman keamanan, baik pada proses pendataan, pelaksanaan pencontrengan – pencoblosan dan sampai penghitungan suara pada tahap akhir di TPS, provinsi dan juga pusat. Oleh karena itu, persoalan tentang keamanan menjadi salah satu isu strategis dan nasional yang sangat penting dikaji sehingga bisa diharapkan mencapai tahapan pelaksanaan pesta demokrasi yang luber jurdil. Intinya, harapan pelaksanaan dalam pesta demokrasi berjalan secara transparan dan kredibel, tanpa kecurangan [8] [9] [10] [11] [12].

Proses panjang pelaksanaan pesta demokrasi tidak bisa terlepas dari munculnya sejumlah ancaman baik secara langsung atau tidak langsung, baik itu pelaksanaannya maupun semua proses yang ada, termasuk juga paslonnya. Oleh karena itu, menjadi penting untuk dapat berusaha menciptakan keamanan sehingga iklim sospol menjadi terkendali [13] [14] [15]. Argumen yang mendasari karena iklim sospol menjadi acuan terhadap kepercayaan investor dan pelaku ekonomi – bisnis. Paling tidak, jika dapat menciptakan iklim sospol yang kondusif maka perilaku investor dan pelaku ekonomi – bisnis tidak *wait and see* (penuh keraguan dan ketidakpastian). Padahal, jika situasi ini terus berlanjut maka bisa saja merubah menjadi *wait and worry* (semakin kacau) sehingga berdampak sistemik terhadap lini usaha dan produksi secara sistematis dan berkelanjutan [2] [3]. Bahkan, jika situasinya terus mencekam maka ini bisa memicu ketidakpercayaan investor sehingga tidak berlanjut terhadap realisasinya.

Belajar bijak dari berbagai pelaksanaan pesta demokrasi maka upaya menciptakan keamanan sedari dini di semua lini prosesnya menjadi penting, termasuk tentunya harapan agar ASN dan semua aparat yang terlibat dalam prosesnya bersikap netral. Netralitas itu sendiri menjadi penting sebab ini menjadi kata kunci dari pelaksanaan pesta demokrasi luber jurdil. Oleh karena itu, alasan mendasar urgensi menciptakan keamanan dari pelaksanaan pesta demokrasi tidak hanya demi mendukung kelancaran proses dan pelaksanaan, tapi juga mengamankan pesta demokrasi untuk mendukung legalitas hasil yang diciptakan [13] [16]. Padahal, legalitas itu sendiri menjadi penting sebagai jaminan dari tahapan 5 tahun ke depan pasca pemenangnya dilantik untuk menjalankan kegiatan di pemerintahan yang sah. Terkait ini, maka identifikasi indek kerawanan pemilu (IKP) terkait dari kepentingan untuk menciptakan keamanan dan stabilitas sospol sehingga ancaman kerawanan di setiap aspek bisa terkendali [13]. Oleh karena itu, tujuan riset ini untuk mengetahui persepsian generasi milenial terhadap penggunaan *e-voting* demi meningkatkan persepsian kemudahan dan kemanfaatannya sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap pelaksanaan pesta demokrasi.

2. Literature Review

Keamanan dari pelaksanaan pesta demokrasi menjadi kata kunci untuk mereduksi kerawanan di semua tahapannya sehingga bisa disebutkan adalah meredam potensi konflik dari awal sampai pada akhir pelaksanaan pesta demokrasi yaitu penetapan pemenang dari pesta demokrasi itu sendiri. Fakta ini menegaskan jaminan keamanan dalam pelaksanaan pesta demokrasi tidak bisa diabaikan karena menjadi kunci dari sukses pelaksanaannya [17] [18]. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pelaksana dari pesta demokrasi untuk mengabaikan urgensi keamanan, termasuk dengan semua

sistem yang digunakan [4] [19] [20]. Persepsian tentang keamanan itu juga mengacu pelaksanaan di proses awal pengajuan paslon. Apa yang terjadi dengan kasus MKMK dan DKPP menjadi pembenar pentingnya menjaga keamanan sedari awal. Paling tidak, ini bisa terlihat dari munculnya sejumlah penolakan dan gugatan terhadap salah satu paslon. Padahal, ancaman terhadap hasil pesta demokrasi bukan tidak mungkin masih akan terus berlanjut [3] [2] [1].

Mereduksi ancaman kerawanan dan keamanan pesta demokrasi tidak saja menjadi tantangan bagi Bawaslu dan KPU tetapi juga semua lapisan masyarakat yang menjadi subyek dan obyek dari pelaksanaan pesta demokrasi. Artinya, keamanan pelaksanaan pesta demokrasi menjadi tuntutan - taruhan terhadap hasil akhir yaitu konsekuensinya terhadap legalitas kepemimpinan yang bisa dihasilkan. Terkait ini maka ada beberapa aspek dasar dibalik komitmen menciptakan keamanan pada pesta demokrasi misalnya netralitas penyelenggaraan pesta demokrasi, pelaksanaan semua tahapan di semua provinsi, terutama sejumlah provinsi baru, potensi polarisasi yang ada di masyarakat sebagai konsekuensi keberagaman dan kemajemukan, kerawanan dibalik penggunaan media sosial dan yang tidak kalah pentingnya adalah persoalan di balik penggunaan hak memilih dan dipilih [21] [22] [14].

Identifikasi tingkat kerawanan yang mengarah kepada ancaman keamanan pada tingkat provinsi maka IKP 2024 menemukan bahwa ada lima daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Kelima provinsi tersebut antara lain DKI Jakarta (88,95), Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86), Jawa Barat (77,04), dan Kalimantan Timur (77,04). Skor tiga provinsi dengan kerawanan tertinggi tersebut mencapai skor di atas 80 – angka yang dihitung cukup jauh dengan ambang nilai kategori kerawanan tinggi, yaitu di atas 66 dengan skor 100 sebagai skala tertinggi [13]. Fakta inilah yang mendasari urgensi menciptakan keamanan dan pengamanan secara sistematis dan berkelanjutan sampai penetapan pemenang [1] [2].

Belajar bijak dari banyaknya persoalan dibalik pelaksanaan pesta demokrasi dengan model klasik – konvensional maka beralasan jika kemudian muncul ide untuk menggunakan sistem *e-vote* atau pesta demokrasi secara *online* (digital) [23] [24] [25]. Usulan ini tidak bisa terlepas dari sukses pelaksanaan pada sejumlah negara dan juga di sejumlah proses pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat yang rendah, termasuk misal temuan kasus di pemilihan kepala desa, dll. Artinya, sukses penggunaan *e-voting* bukan tidak mungkin juga bisa dilakukan pada level secara nasional, termasuk misal di pesta demokrasi, baik pilkada atau pilpres. Meski demikian, penggunaan *e-voting* sebagai bagian dari adopsi teknologi tidak bisa terlepas dari sejumlah faktor, misalnya kemanfaatan, kemudahan, kepercayaan, kecepatan, kenyamanan dan juga keamanan (risiko) [26] [27] [28]. Argumen yang mendasari karena penggunaan *e-voting* terkait teoritis *Technology Acceptance Model* (TAM), *Theory of planned behaviour* (TPB) atau *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang mengacu keperilakuan [29] [30]. Oleh karena itu, sinergi ketiga teoritis tersebut menjadi acuan dalam riset keperilakuan, termasuk juga terkait model *e-voting* sebagai bagian dari demokrasi di era digital [31] [32] [15].

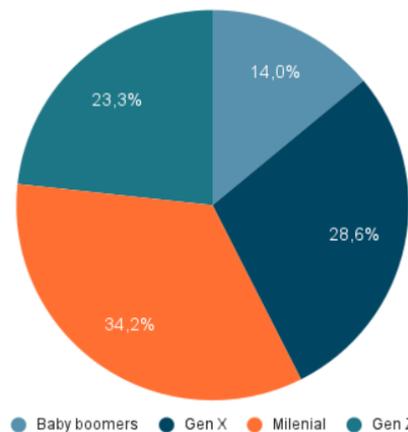
3. Metode

Penelitian ini melibatkan generasi milenial yang dilakukan dengan wawancara secara langsung terhadap 6 orang sebagai pemilih di pesta demokrasi. Kualifikasinya adalah yang pernah terlibat dalam pemilihan 2 kali sehingga ada perbandingan antara yang pernah dilakukan di masa lalu dan prediksi pelaksanaan pesta demokrasi secara

e-voting di masa depan. Oleh karena itu, pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Wawancara dilakukan Senin 5 pebruari 2024 jam 10.00 tepatnya sehari setelah debat capres ke-5 pada Minggu 4 Februari 2024.

4. Hasil dan Pembahasan

Pemilihan partisipan dari generasi milenial (gen z) di riset ini tidak bisa terlepas dari realitas di pesta demokrasi 2024 bahwa mayoritas adalah generasi milenial. Data BPS terkait komposisi penduduk di Indonesia (struktur generasi) mengacu Sensus Penduduk 2020 yaitu pertama: Post Generasi Z (Post Gen Z, lahir tahun 2013 dan seterusnya, jumlah 29.17 juta jiwa atau 10,88%), kedua: Generasi Z (Gen Z, lahir antara tahun 1997 – 2012, dominan berjumlah 74,93 juta jiwa atau 27,94% populasi). Generasi ini berusia muda hingga remaja awal (memberikan harapan potensi kemajuan dan perubahan di masa depan). Ketiga Generasi Milenial (lahir antara tahun 1981 - 1996, berjumlah 69,38 juta jiwa atau 25,87%). Akumulasi Gen Z dan Generasi Milenial mencapai 270,2 juta jiwa. Keempat: Generasi X (Gen X, lahir tahun 1965 - 1980, berjumlah 58,65 juta jiwa atau 21,88%). Kelima: Generasi Baby Boomer (lahir tahun 1946 - 1964 berjumlah 31,01 juta jiwa atau 11,56%) dan keenam: Pre-Boomer (lahir sebelum tahun 1945, jumlah 5,03 juta jiwa atau 1,87%).



Gambar 1 Persentase Pemilih Pesta Demokrasi

Partisipan penelitian ini melibatkan 6 generasi milenial yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap sesuai daerah masing-masing. Wawancara dilakukan secara mendalam (*indepth interview*) tanpa mempertanyakan pilihan dari ketiga paslon yang bersaing pada pilpres. Hal ini dilakukan untuk menghindari intervensi terhadap pilihan masing-masing karena sejatinya pesta demokrasi memang harus bisa dilakukan secara luber jurdil. Oleh karena itu, tahapan dalam wawancara lebih terfokus kepada peluang penggunaan *e-voting* dalam pesta demokrasi pada masa depan untuk mendapatkan berbagai manfaat terbaik dari pelaksanaan *e-voting* itu sendiri [21] [4].

Tabel Partisipan dalam wawancara

NO	NAMA	NIM	WA	ALAMAT
1	Fitriyana Putri Fahendri	B10020041X	0821-3822-177X	Mendungan, Sukoharjo
2	Eva Tri Wahyuni	B10020040X	0822-3041-907X	Tulungagung, Jatim
3	Icha Damayanti	B10020038X	0812-2868-778X	Sragen, Jawa Tengah
4	Chandra Reta Mefia	B10020042X	0857-3656-301X	Ngawi, Jawa Timur
5	Hanum Salsabila N	B10020039X	0898=7520-91X	Pati, Jawa Tengah
6	Shaka Yudha Pratama	B10020040X	0822-2312-000X	Boyolali, Jawa Tengah

Apakah anda sudah memutuskan memilih pada 14 Pebruari 2024 ?

Fitriyana Putri Fahendri (FP): “sudah menentukan pilihan”

Eva Tri Wahyuni (ET): “saya yakin dengan keputusan pilihan saya”

Icha Damayanti (ID): “sudah dan semoga tidak berubah”

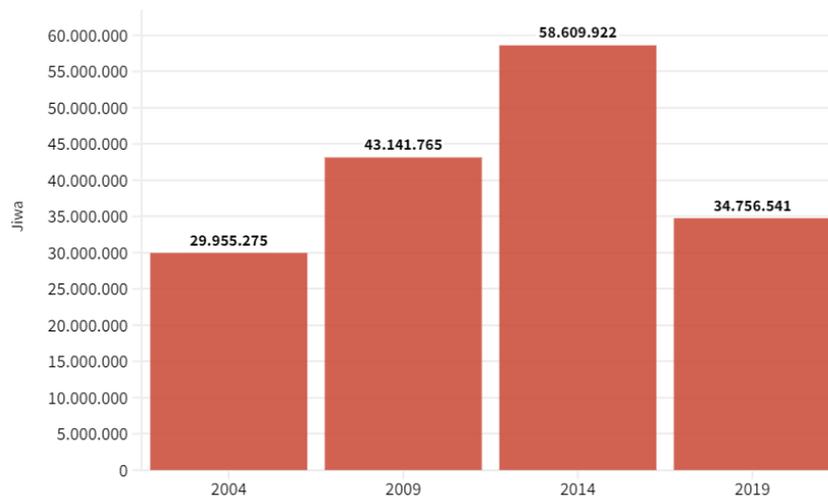
Chandra Reta Mefia (CR): “semoga pilihan saya amanah”

Hanum Salsabila N (HS): “sudah memutuskan dan semoga pilihan saya tepat”

Shaka Yudha Pratama (SY): “saya yakin dengan keputusan saya memilihnya”

Semua partisipan menegaskan mereka telah memutuskan memilih dari ketiga paslon pada pelaksanaan hari H pesta demokrasi, terutama pilpres yaitu 14 Pebruari 2024. Hal ini secara tidak langsung menegaskan semua partisipan berpartisipasi aktif di pesta demokrasi (tidak golput). Setidaknya hal ini mereduksi kekhawatiran generasi milenial di pesta demokrasi, sementara eksistensi generasi milenial menjadi pemilih terbesar dalam DPT pada hajatan pesta demokrasi pada tahun 2024. Hal ini berdampak positif terhadap keyakinan pemilih di pesta demokrasi untuk tidak golput.

Tabel 1 Jumlah Golput pada Pemilu (2004-2019)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Anda pada tahun 2019 juga pernah melakukan pemilihan dan menjadi pemilih pemula. Pelajaran apa yang anda dapat di pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2019?

(FP): “kertas suara terlalu banyak, bingung memilihnya”

(ET): “saya kesulitan untuk menentukan pilihan dengan banyaknya calon”

(ID): “tidak terbayangkan jika orang tua yang memilih, apa sebingung saya juga?”

(CR): “semoga kebingungan yang saya rasakan tidak dialami oleh yang lainnya”

(HS): “apakah tidak bisa dibuat lebih ringkas, praktis dan tidak rumit pilihannya?”

(SY): “betapa ribetnya dengan sekian banyak kandidat yang harus dipilih?”

Semua partisipan menegaskan bahwa banyaknya parpol dan banyaknya kandidat yang harus dipilih berdampak terhadap kebingungan pemilih untuk menentukan siapa yang harus dipilih untuk bisa mewakili aspirasi mereka di struktur perwakilan, baik di DPRD kabupaten/kota, di provinsi dan DPD, termasuk DPR pusat dan keterwakilan dalam pilpres. Artinya, semakin banyak alternatif pilihan atau kandidat maka semakin banyak pertimbangan, termasuk juga kertas suara di balik bilik yang harus dibuka, dibaca, dicermati dan akhirnya dipilih. Setidaknya ini membutuhkan waktu yang lebih

lama dan ribet untuk menentukan pilihan yang terbaik sesuai hati nurani. Terkait ini, beralasan jika ada harapan membuat pesta demokrasi lebih praktis, simpel, dan mudah tanpa harus mengurangi esensi dari pelaksanaan pesta demokrasi secara luber jurdil sehingga harapan regenerasi dan juga suksesi kepemimpinan tetap berjalan khidmat. Artinya, argumen ini menjadi dasar terkait penggunaan *e-voting* di pesta demokrasi nantinya [22] [14] [6].

Jika ada rencana untuk merubah model pelaksanaan pesta demokrasi dari cara manual – tradisional – *offline* (datang ke TPS dan masuk ke bilik suara) menjadi model *e-voting* yang modern – *online (realtime online)* apakah anda setuju?

(FP): “setuju, mengapa tidak”

(ET): “saya sangat setuju daripada model seperti yang sudah ada seperti sekarang”

(ID): “saya juga setuju daripada ribet datang ke TPS dan bilik suara”

(CR): “semoga bisa secepatnya direalisasikan, biar lebih praktis dan tidak ribet”

(HS): “apakah bisa dipraktekan?, meski saya setuju secepatnya dilaksanakan”

(SY): “Saya setuju tapi betapa ribetnya dengan kepentingan politis yang ada?”

Semua partisipan menegaskan bahwa mereka setuju dengan penggantian model pesta demokrasi dari cara lama yang cenderung kuno, klasik, manual, tradisional dan *offline* menjadi cara terbaru yang lebih modern dan *online* karena bisa dilakukan secara *realtime online* tanpa harus datang ke TPS dan bilik suara dengan membawa setumpuk kertas suara untuk dicoblos sesuai pilihan nurani. Hal ini memberi gambaran bahwa pesta demokrasi secara *online* akan menjanjikan kecepatan, kemudahan, kemanfaatan dan kenyamanan, meski tetap ada ancaman risiko [32] [27] [15] [14].

Jika *e-voting* dilakukan pada pesta demokrasi tahun 2029, apa yang anda sarankan?

(FP): “harus ada jaminan terhadap keamanan sistem, apapun aplikasi yang dipakai”

(ET): “model adopsi teknologi, termasuk *e-voting* tidak bisa lepas dari risiko, baik *human error* dan *technical error* maka keduanya harus diantisipasi”

(ID): “apakah ada jaminan terhadap keamanannya, bagaimana potensi *hacker*?”

(CR): “sistem *e-banking* saja masih ada kerawanan, bagaimana dengan *e-voting*?”

(HS): “semua model adopsi pasti mengandung risiko, termasuk juga *e-voting*”

(SY): “jaminan kecepatan, kemudahan dan kenyamanan pasti ada ancaman risiko termasuk aspek penting keamanan *e-voting* itu sendiri dan ini harus dikaji”

Semua partisipan menegaskan urgensi dari pelaksanaan *e-voting*, terutama untuk memberikan jaminan terhadap kecepatan, kemudahan, kemanfaatan dan kenyamanan [19] [17] [8]. Hal ini selaras dengan teoritis *Technology Acceptance Model - TAM* [31]. TAM menegaskan adanya 2 faktor penting yaitu *Perceived Usefulness* (kemanfaatan) dan *Perceived Ease Of Use* (kemudahan). Meski demikian, pertimbangan risiko tidak bisa diabaikan sehingga risiko terkait dengan ancaman *human error* dan *technical error*. Persepsi tentang risiko terkait dengan ketidakpastian, baik dari faktor internal dan juga eksternal [28] [25] [24] [6]. Padahal, komitmen mereduksi dan mengantisipasi risiko menjadi faktor kunci dari keberhasilan adopsi teknologi karena berkaitan dengan faktor kepercayaan - *trust* [30] [29]. Oleh karena itu, aplikasi TAM tidak bisa terlepas dari faktor kemudahan, kemanfaatan, kepercayaan dan risiko. Dari pemahaman ini TAM memiliki 5 konstruk, yaitu: *Perceived Usefulness* (kemanfaatan), *Perceived Ease of Use* (kemudahan), *Attitude Toward Using Technology* (sikap), *Behavioral Intention to Use* (intensi) dan *Actual Technology Use* (penggunaan teknologi sesungguhnya). Hal

lain yang juga perlu dicermati bahwa persepsian tentang kemudahan dan kemanfaatan tidak bisa terlepas dari dualisme dan dikotomi antara generasi milenial dan kelompok usia tua, termasuk di perkotaan dan pedesaan, juga kelas sosial menengah – atas dan bawah [26] [14] [12] [10].

5. Kesimpulan

Urgensi perubahan paradigma penggunaan teknologi terbaru atau modern dalam mendukung pelaksanaan pesta demokrasi sangat dimungkinkan [21] [19] [18]. Hal ini juga didukung dengan akses internet yang semakin cepat dan tarifnya semakin murah sehingga semua aplikasi berbasis internet bisa dilakukan secara *real time online* tanpa mengenal jeda ruang dan waktu [23] [22] [8]. Oleh karena itu, penggunaan *e-voting* pada pelaksanaan pesta demokrasi sangat dimungkinkan. Argumen yang mendasari tidak hanya mampu memberikan jaminan kecepatan, kemudahan, kemanfaatan dan kenyamanan tapi juga keakuratan. Meski demikian juga harus dipahami ancaman risiko, baik faktor *human error* ataupun *technical error*. Hal mendasar yang menjadi argumen adalah potensi dari ancaman risiko internal dan eksternal. Fakta ini menjadi argumen terkait pertimbangan penerapan *e-voting* dalam pelaksanaan pesta demokrasi [28] [25] [12] [10].

Harapan dan tantangan dari penggunaan *e-voting* dalam pesta demokrasi maka pemerintah sebagai pemangku kepentingan dan KPU sebagai pelaksana pelaksanaan pesta demokrasi berkepentingan untuk memberi jaminan terkait harapan kecepatan, kemudahan, kemanfaatan dan faktor kenyamanan dengan tanpa mengabaikan urgensi mereduksi semua ancaman risiko yang ada. Realita ini menjadi tantangan untuk dapat membangun sistem yang kredibel sehingga dapat menguatkan kepercayaan (*trust*) dan sekaligus mereduksi risiko (*risk*) [32] [27] [15] [14]. Meski tidak mudah dan mengacu aspek pertimbangan jangka waktu yang ada maka tidak ada alasan lagi untuk tidak mempersiapkan sistem terbaik yang bisa untuk memberikan kualitas layanan pesta demokrasi terbaik sehingga bisa menguatkan legitimasi dari hasil pelaksanaan pesta demokrasi. Oleh karena itu, pertimbangan mendasar dari keamanan untuk mereduksi risiko adalah proses awal pendataan, jaminan luber jurdil dalam pelaksanaan dan juga semua proses rekap data, termasuk penghitungan suara sebagai implementasi pasca pelaksanaan pesta demokrasi (mulai TPS di level terendah sampai ke pusat atau KPU).

Referensi

- [1] E. P. Saputro, “Kampus Bersuara.” Jawa Pos Radar Solo, Solo, p. 1, 2024. [Online]. Available: <https://radarsolo.jawapos.com/opini/844129492/kampus-bersuara>
- [2] E. P. Saputro, “Ada apa dengan pesta demokrasi?” Kompasiana, Jakarta, p. 1, 2024. [Online]. Available: <https://www.kompasiana.com/edypurwosaputro4503/65cbf926de948f0c1f6880e2/ada-apa-dengan-pesta-demokrasi>
- [3] E. P. Saputro, “Belajar Bijak dari Pilpres.” Jawa Pos Radar Solo, Solo, p. 1, 2024. [Online]. Available: <https://radarsolo.jawapos.com/opini/844200970/belajar-bijak-dari-pilpres>
- [4] M. . Alomari, “E-voting Adoption in a Developing Country,” *Transform. Gov. People, Process Policy*, vol. 10, no. 4, pp. 526–547, 2016.
- [5] I. Darmawan, “E-voting Adoption in Many Countries: A Literature Review,” *Asian J. Comp. Polit.*, vol. 6, no. 4, pp. 482–504, 2021.
- [6] J. Gibson, J.P., Krimmer, R., Teague, V., & Pomares, “A Review of E-voting: The

- Past, Present and Future,” *Ann. Telecommun.*, vol. 71, pp. 279–286, 2016.
- [7] & H. Risnanto, S., Mohd, O., Hafeizah, N., Mardiana, N., Abdurrohman, “Constructing and Optimizing an Evaluation Model for the Implementation of Electronic Voting: An Indonesian Case Study,” *Math. Model. Eng. Probl.*, vol. 10, no. 4, pp. 1401–1408, 2023.
- [8] M. . Fisher, J. & Savani, “Who’s in charge? The Impact of Delivery and Perception of Risk on The Willingness to Voting Online,” *Br. J. Polit. Int. Relations*, vol. 25, no. 4, pp. 676–700, 2023.
- [9] J. S. & D. S. W. J. Bannet, D. W. Price, A. Rudys, “Hack-a-Vote: Security Issues with Electronic Voting Systems,” *IEEE Secur. Priv.*, vol. 2, no. 1, pp. 32–37, 2004.
- [10] M. Hamed, E & Sedky, “A High Secured, Cost Effectively E-voting System,” *Int. J. Inf. Secur. Cybercrime*, vol. 5, no. 1, pp. 11–31, 2016.
- [11] I. . Mensah, “Impact of Performance Expectancy, Effort Expectancy, and Citizen Trust on the Adoption of Electronic Voting System in Ghana,” *Int. J. Electron. Gov. Res.*, vol. 16, no. 2, pp. 19–32, 2020.
- [12] A. Sheranova, “Cheating the Machine: E-voting Practices in Kyrgyzstan’s Local Elections,” *Eur. Rev.*, vol. 28, no. 5, pp. 793–809, 2020.
- [13] T. Yuniarto, “Indeks Kerawanan Pemilu dan Keamanan Pesta Demokrasi.” Kompas Pedia, Jakarta, p. 1, 2023. [Online]. Available: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/indeks-kerawanan-pemilu-dan-keamanan-pesta-demokrasi>
- [14] S. Farooq, A., Warkentin, M., & Virtanen, “Role of Shared Identity and Agency Trust in Online Voting among Finnish Citizens,” *Technol. Soc.*, vol. 76, no. 10242, 2024.
- [15] B. Zhu, Y.Q., Azizah, A. H., & Hsiao, “Examining Multi-dimensional Trust of Technology in Citizens’ Adoption of E-voting in Developing Countries,” *Inf. Dev.*, vol. 37, no. 2, pp. 193–208, 2021.
- [16] B. Aljarrah, E., Elrehail, H., dan Aababneh, “E-voting in Jordan: Assessing Readiness and Developing a System,” *Comput. Human Behav.*, vol. 63, pp. 860–867, 2016.
- [17] F. Ciancio, A., & Kämpfen, “The Heterogeneous Effects of Internet Voting,” *Eur. J. Polit. Econ.*, vol. 79, no. 102444, 2023.
- [18] B. Choi, S. & Kim, “Voter Intention to Use E-Voting Technologies: Security, Technology Acceptance, Election Type and Political Ideology,” *J. Inf. Technol. Polit.*, vol. 9, no. 4, pp. 433–452, 2012.
- [19] E. . Anagreh, L.F., & Abu-Shanab, “Voter’s Intention to Use Electronic Voting Systems,” *Int. J. E-bus. Res.*, vol. 13, no. 3, pp. 67–85, 2017.
- [20] A. Cubric, M. & Jefferies, “The Benefits and Challenges of Large-scale Deployment of Electronic Voting Systems: University Student Views from Across Different Subject Groups,” *Comput. Educ.*, vol. 87, pp. 98–111, 2015.
- [21] P. Ehin, P., Solvak, M., Willemsen, J., & Vinkel, “Internet Voting in Estonia 2005–2019: Evidence from Eleven Elections,” *Gov. Inf. Q.*, vol. 39, no. 4, p. 101718, 2022.
- [22] A. Eraky, “E-Voting Implementation in Egypt,” *J. Contemp. East. Asia*, vol. 16, no. 1, pp. 48–68, 2017.
- [23] U. Germann, M., & Serdült, “Internet Voting and Turnout: Evidence from Switzerland,” *Elect. Stud.*, vol. 47, pp. 1–12, 2017.
- [24] R. . Geys, B., Heggedal, T., & Sørensen, “Age and Vote Choice: Is There a Conservative Shift among Older Voters?,” *Elect. Stud.*, vol. 76, no. 102485, 2022.
- [25] P. Nemeslaki, A., Aranyossy, M., & Sasvári, “Could On-line Voting Boost Desire to Vote? – Technology Acceptance Perceptions of Young Hungarian Citizens,” *Gov. Inf. Q.*, vol. 33, no. 4, pp. 705–714, 2016.
- [26] P. Petitpas, A., Jaquet, J.M., & Sciarini, “Does E-Voting Matter for Turnout and to Whom?,” *Elect. Stud.*, vol. 71, no. 102245, 2021.
- [27] A. Pleger, L. E., & Mertes, “Use and Assessment of E-Voting Systems: Findings from an Online-Survey among Swiss Nationals Living Abroad,” *Swiss Yearb. Adm. Sci.*, vol. 9, no. 1, pp. 1–11, 2018.
- [28] J. Powell, A., Williams, C.K., Bock, D.B., Doellman, T., & Allen, “E-Voting Intent: A Comparison of Young and Elderly Voters,” *Gov. Inf. Q.*, vol. 29, no. 3, pp. 361–372, 2012.
- [29] F. D. Venkatesh, V., & Davis, “A Theoretical Extension of the Technology

- Acceptance Model : Four Longitudinal Field Studies,” *Manag. Sci. Publ.*, vol. 46, no. 2, pp. 186–204, 2000.
- [30] M. G. Venkatesh, V., Speier, C., & Morris, “User Acceptance Enablers in Individual Decision Making About Technology: Toward an Integrated Model,” *Decis. Sci.*, vol. 33, no. 2, pp. 297–316, 2002.
- [31] F. . Davis, “Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology,” *MIS (Management Inf. Syst. Q.)*, vol. 13, no. 3, pp. 319–340, 1989.
- [32] P. Saini, N, Verma, H & Sharma, “An Analytical Study of E-Voting System,” *Int. J. Recent Res. Asp.*, vol. 4, no. 3, pp. 75–85, 2017.